

	No. Alumni Universitas:	HURIA WAHYUNI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Sijunjung, 09 Desember 1991 b) Nama Orang Tua : Afrizal c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara (PK VI) e) No BP : 0910113394	f) Tanggal Lulus : 24 April 2014 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,24 i) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Komplek Perumnas Selasah Indah Blok A No. 1 Muaro Sijunjung	

**EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(Huriah Wahyuni, 0910113394, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2013, Jumlah halaman 74)**

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkandalamrapatParipurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota (Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Komisioner Ombudsman dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan (Pasal 10 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman Republik Indonesia). Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah Bagaimanakah eksistensi lembaga Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Lembaga Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi terhadap naskah-naskah atau buku-buku. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman sangat penting karena dapat melindungi hak masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari penyelenggara negara sebagai unit pemberi pelayanan kepada masyarakat itu sendiri demi tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tetapi dengan adanya keberadaan pasal 10 dalam undang-undang Ombudsman ini, secara tidak langsung menimbulkan multitafsir bagi setiap komisioner Ombudsman, sehingga komisioner Ombudsman merasa kebal hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci : Ombudsman Republik Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 April 2014.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Henny Andriani, S.H., M.H	Charles Simabura, S.H., M.H

Mengetahui, Ketua Bagian HTN : **Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H**

Tandatangan: _____

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	TandaTangan: